



Pemkab Potong Perjalanan Dinas 7 Persen

▶ *Hearing* DPRD dan Eksekutif Cegah Covid-19



Moh Zaini
Sekretaris Daerah Kapuas Hulu

Rencana kebutuhan dana untuk mengantisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 sangat besar.

PUTUSSIBAU, SP – DPRD Kapuas Hulu menggelar rapat dengar pendapat (*hearing*) terkait pemotongan biaya perjalanan dinas Pemerintah Daerah Kapuas Hulu di Ruang Rapat Komisi Gedung DPRD setempat, Jumat (3/4) kemarin.

Pertemuan tersebut berlangsung dengan memperhatikan standar pencegahan penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu tetap menjaga jarak serta membatasi jumlah peserta pertemuan.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD dan Ketua-Ketua Fraksi, sedangkan dari pihak

eksekutif dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Moh Zaini.

Diketahui bahwa pemotongan biaya perjalanan dinas pemda tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 903/542/BKD/ APB-A Tanggal 01 April 2020 tentang Pemotongan Belanja Perjalanan Dinas

Luar Daerah.

Dalam penjelasannya, Zaini menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diambil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta memperhatikan Alokasi Belanja Tidak Terduga yang ada dalam APBD Tahun 2020 yang sangat terbatas.

“Sedangkan rencana kebutuhan dana untuk mengantisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 sangat besar,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Zaini, diminta kepada seluruh Kepala SKPD agar melakukan pemotongan belanja perjalanan dinas luar daerah yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar kurang lebih 7 % (tujuh persen).

“Yang selanjutnya akan dilakukan pergeseran ke Belanja Tidak Terduga. Ini sudah sesuai dengan Permendagri,” tuturnya. **(sap/bah)**